

## BAHASA AKUNTANSI SEBAGAI “DISCOURSE-DRIVEN” DALAM BUDAYA KAPITALISME BARU

Banu Witono

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

*bw257@ums.ac.id*

---

### ABSTRACT

*It is undeniable that accounting as a science or practice developed at this time considered to be born of the "womb" of capitalism, also led to the development of accounting theory is consistent with capitalism itself. This article highlights the dialectic accounting laden with cultural values contained therein. A study of discourse is used to generate an understanding of how the language has become a 'discourse-driven' to the new capitalism in order to generate the values in a culture where accounting flourish. The basic concepts and theories developed in accounting has become a tool of technology which is used as a justification of the interests in favor of the neo-capitalist.*

**Keywords:** *Accounting Language, Discourse-Driven, Neo-capitalism*

### Pendahulun

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak pernah lepas dari dinamika perubahan gerak pemikiran para filosof, cendekiawan, saintis dan peneliti dalam berbagai dialektika dan diskursus bagaimana memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Setiap saintis pada saat menjelaskan suatu konsep atau teori, terlebih dahulu mengembangkan beberapa definisi, pernyataan dan interrelasi antar pernyataan. Setelah itu melakukan konseptualisasi terhadap suatu fenomena dan ini akan menjadi dasar dari suatu teori formal yang akan dikemukakannya kemudian. Adanya “ide baru” berarti adanya cara pandang yang berbeda dari yang sebelumnya dalam memandang dan menjelaskan fenomena yang sama yang mungkin tidak dapat dijelaskan oleh penggagas sebelumnya atau tidak menyadarinya. Inilah yang disebut Thomas Kuhn dalam bukunya “The Structure of Scientific Revolution” sebagai paradigma (Salam, 2011 hal. 70), cara pandang (paradigma) bahwa ilmu pengetahuan (scientific knowledge) yang ada saat ini merupakan rangkaian kumpulan ilmu pengetahuan terdahulu.

Perdebatan mengenai “positioning” akuntansi dalam ranah ilmu pengetahuan (science) juga tidak lepas dari perbedaan sudut pandang pemikiran

(baca paradigma). Awal diskursus mengenai akuntansi baik sebagai struktur pembuatan aturan dan praktek dalam bisnis seringkali memunculkan pertanyaan apakah akuntansi merupakan art atau science. Di tahun 1940an, Kelley menerima akuntansi sebagai science dan tidak berselang lama ditahun 1950an, Cullather menganggap bahwa akuntansi lebih dekat dengan apa yang disebutnya “liberal art” atau “practical art”. Akan tetapi keduanya tidak memberikan kriteria yang jelas atas perbedaan pemaknaan antara science dan art tersebut, kecuali hanya berdasarkan atas praduga dan penilaian isu-isu yang berkembang saat itu. Pandangan lainnya berasal dari Sterling ditahun 1970an, yang memposisikan akuntansi jika dipandang dari sisi praktis atau bagaimana akuntan mendefinisikan masalah, lebih dekat dengan art dari pada science. Namun jika akuntansi dipandang dari sisi terminologi metode dan perannya dalam pengukuran teori, maka akuntansi cenderung lebih kepada science (Wolk dan Tearney, 1997 hal.28).

Dalam perkembangannya, ternyata akuntansi telah merambah dalam dinamika diskursus dan dialektika yang demikian pesat yang mencoba memposisikan akuntansi dalam perspektif ilmu-ilmu pengetahuan pasti (natural science) atau ilmu-ilmu pengetahuan sosial (social science). Akuntansi diletakkan sebagai “kelinci percobaan ilmiah”

pengujian paradigma yang berkembang saat ini. Berbagai sudut pandang pendekatan digunakan (paradigma) seperti paradigma positivisme (fungsionalisme), interpretivisme, kritis, postmodernisme (lihat Burrell dan Morgan, 1994; Chua, 1984; Gioia dan Pitre, 1990) bahkan spiritualisme (lihat Triyuwono, 2006, 2007, 2009; Harahap, 1997, 2001, 2007) sebagai “pisau bedah”nya.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa akuntansi baik sebagai ilmu dan praktek yang berkembang saat ini dianggap lahir dari “rahim” kapitalisme. Selam ini, akuntansi selalu berinteraksi dan berkembang secara aktif melalui gerak dialektika pada peradaban barat. Gerak ini memunculkan pula perkembangan teori akuntansi yang sejalan dengan kapitalisme itu sendiri. Sebagaimana pandangan Tricker (1978) yang melihat akuntansi sebagai anak dari budaya di mana akuntansi itu berada, dengan kata lain akuntansi sebagai suatu ilmu maupun prakteknya yang sangat kompleks (lihat juga Morgan 1988, Hines 1989 dan Francis 1993).

Jika lingkungan yang membentuk akuntansi tersebut adalah lingkungan kapitalisme, maka perkembangan akuntansi sebagai ilmu dan prakteknya akan bernafaskan kapitalisme juga. Harahap (1997) menjelaskan bahwa akuntansi yang dibentuk oleh lingkungannya akan mempengaruhi alur pikir dan jiwa dari akuntansi. Jaringan kerja dan relasi-relasi yang dibentuk kapitalisme telah mengubah perilaku dalam praktek akuntansi serta turut dalam mewarnai teori akuntansi yang disebut-sebut sebagai instrumen penting dalam bahasa bisnis (*the language of business*).

Dalam tulisan ini, penulis akan memandang akuntansi secara lebih luas, bukan hanya sebagai technical skills (pengetahuan mengenai angka-angka atau debit dan kredit), melainkan melihat akuntansi sebagai bagian dari bangunan ilmu pengetahuan sosial. Akuntansi yang tidak terlepas dari unsur manusia sebagai pelaku akuntansi, baik secara konsepsi maupun praktek dan berbagai aspek yang mempengaruhinya. Dari sudut pandang ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan praktek bisnis dapat dianggap merupakan bagian dari akuntansi (Suwarjuwono, 2005 hal, 89-90). Disisi lain bangunan akuntansi dibentuk melalui landasan berfikir dan asumsi-asumsi yang dikembangkan dari penalaran dan hasil interpretasi

individu- individu pelaku akuntansi yang saling berinteraksi dalam lingkungan akuntansi baik dalam diskursus keilmuan maupun praktek. Sehingga akuntansi menurut Suwarjuwono (2005 hal 90) tidak pernah terlepas dari pengaruh tata nilai (*not free value*) dan kepentingan (*interest*) dan konteks sosial dimana akuntansi itu diterapkan.

Sehingga jelas bahwa meskipun akuntansi memang dibentuk oleh lingkungan dan budaya yang melingkupinya (*socially constructed*), akuntansi dapat pula berbalik mempengaruhi lingkungan dan budaya yang membentuknya (*socially constructing*) sebagaimana ungkapan Mathews dan Parera (1993; 15) dengan mengatakan :

*“Although the conventional views is that accounting is socially constructed as a result of social, economic and political events, there are alternative approaches which suggest that accounting may be socially constructing”.*

Hal ini sekaligus memastikan bahwa akuntansi bukanlah suatu bentuk ilmu pengetahuan dan praktek yang bebas dari nilai (*value free*), tetapi sebaliknya akuntansi adalah disiplin ilmu pengetahuan dan praktek yang sarat dan kental dengan nilai. Oleh karenanya, jika akuntansi berkembang dalam era kapitalisme, sangat mungkin nilai-nilai yang melekat dalam setiap elemen-elemennya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kapitalisme itu sendiri.

Artikel Norman Fairclough (2003) yang berjudul *“Critical Discourse Analysis in Researching Language in the New Capitalism: Overdetermination, Transdisciplinarity and Textual Analysis”* telah menggambarkan transformasi radikal kapitalisme kedalam wajah kapitalisme baru setelah berakhirnya perang dunia kedua beserta dampak yang ditimbulkan dari transformasi yang dilakukannya terhadap dunia. Dalam artikel tersebut, Fairclough juga menjelaskan bagaimana kapitalisme baru menggunakan bahasa dalam proses transformasinya. Sebagaimana Fairclough mengutip terminologi *„new planetary vulgate”* yang digunakan Bourdieu dan Wacquant untuk membahasakan ide-ide kapitalisme baru dengan kosa kata *globalization, flexibility, governance, employability, exclusion* dan sebagainya. Fairclough juga berusaha menyingkap tabir ide umum dari kapitalisme baru dalam penggunaan bahasa seperti *„knowledge-based”* atau *„knowledge-driven”*, *„socio-economic order”* yang

dianggapnya sebagai discourse-driven yang mungkin bisa diartikan mengendalikan dan mengarahkan wacana. Fairclough menganggap penting penggunaan bahasa sebagai „*discourse driven*” dalam melakukan transformasi sosial – ekonomi kontemporer dan dengan didukung oleh kekuatan performatif sebagaimana yang digunakan neoliberalis (kapitalisme baru) untuk menghilangkan hambatan-hambatan menuju „*socio-economic order*”

Berdasarkan pembahasan tersebut, ada dua pertanyaan yang dapat diajukan dalam tulisan ini, yaitu: bagaimana peran akuntansi dalam pembentukan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya dimana akuntansi itu berkembang, yaitu budaya kapitalisme baru? Dan bagaimana penggunaan bahasa sebagai „*discourse driven*” yang digunakan kapitalisme baru pada bidang teori akuntansi? Dengan menggunakan pendekatan sebagaimana yang dilakukan oleh Norman Fairclough (2003), penulis mencoba untuk melakukan kajian wacana secara umum- jika tidak bisa disebut analisis wacana – dalam menjawab dua pertanyaan tersebut Menurut Gadamer, bahasa adalah wahana antara pengalaman nyata, tradisi dan proses pemahaman (Hirschheim, 1985 dalam Suwarjuwono, 2005 hal. 90).

## Kajian Pustaka

### Kajian Akuntansi Dalam Budaya Kapitalisme Baru

Diskursus mengenai kapitalisme baru (new *capitalism*) berkembang sebagai respon atas krisis pasca perang dunia kedua sebagai upaya kapitalisme mentransformasi dirinya sehingga ekspansi ekonomi dapat terus berjalan. Transformasi ini meliputi restrukturisasi hubungan domain ekonomi, politik dan sosial dan „*re-scaling*” hubungan antara skala perbedaan kehidupan sosial global, regional, nasional dan lokal yang mendorong kearah terwujudnya kapitalisme global yang tak terbatas. Hal ini dipaksakan pada ekonomi „*post-socialist*” sebagai anggapan cara terbaik untuk transformasi sistem, pembaharuan ekonomi dan pengintegrasian kembali menuju ekonomi global (Fairclough, 2003)

Namun kapitalisme global dengan „anak emasnya” ekonomi global telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap kesejahteraan sosial secara universal. Negara-negara tidak lagi

memperhatikan bahkan mengurangi proteksi terhadap masyarakatnya dalam menghadapi pasar bebas/pasar global. Terjadi peningkatan kesenjangan antara miskin dan kaya, meningkatkan perasaan tidak aman dan stres secara ekonomi serta semakin intensifnya eksploitasi atas buruh. Pertumbuhan yang tidak terbatas juga menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan. Kapitalisme global juga melahirkan imperiliasme baru, dimana lembaga-lembaga keuangan internasional dibawah pengawasan USA dan sekutu-sekutunya yang kaya (contoh IMF, World Bank) memaksakan restrukturisasi ekonomi secara diskriminatif, dan sering kali membawa konsekuensi yang mendatangkan malapetaka. Bentuk lain dari imperialisme baru adalah penggunaan aksi militer dalam “perang terhadap teroris” dalam bentuk fakta-fakta yang dipaksakan sebagai bagian dari upaya integrasi ekonomi internasional. Akibat dari semua ini adalah adanya disorientasi dan menghilangkan kekuatan secara ekonomi, politik dan sosial dengan melakukan alternatif radikal dan memberikan kontribusi pada berakhirnya debat publik serta melemahkan demokrasi (Fairclough, 2003)

Dalam menancapkan kukunya pada dunia, kapitalisme mendasarkan diri pada konsep liberalisme dan telah menjadi fondasi kuat bagi kapitalisme dalam mencengkrum dunia. Secara ringkas ada tiga ciri utama dari konsep liberal ini, yaitu kebebasan individual untuk bersaing secara bebas, diakuinya kepemilikan pribadi dan penentuan harga berdasarkan pasar bebas. Dan untuk melanggengkan dominasi politiknya, maka dimunculkanlah gagasan neo-liberalisme berupa intervensi negara dalam pembentukan harga berdasarkan pasar bebas melalui peraturan perundang-undangan (Rizky dan Majidi, 2008 hal. 233) sebagai akibat dari tekanan politik multilateral melalui kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan World Bank. Dalam pendekatan kebijakan luar negeri, penggunaan cara-cara politis, tekanan ekonomi, diplomasi dan bahkan intervensi militer pun dilakukan demi pembukaan pasar luar negeri dalam kerangka perdagangan bebas. Serta untuk meningkatkan efisiensi korporasi, neoliberalisme berusaha keras untuk menolak atau mengurangi kebijakan hak-hak buruh seperti upah buruh, dan hak-hak daya tawar kolektif

lainnya.

Secara makro, tampak jelas bahwa dampak yang dihasilkan dari gelombang kapitalisme baru telah “meluluh lantakkan” sendi-sendi kehidupan yang tidak terbatas pada ruang dan waktu dengan bahasa globalisasinya. Disisi lain tentunya dampak secara makro sudah pasti akan berimbas pada skala yang lebih sempit (mikro), termasuk akuntansi didalamnya. Hal ini dapat ditinjau dari perumusan struktur teori akuntansi yang didefinisikan sebagai asumsi dasar, definisi- definisi, prinsip-prinsip dan konsep-konsep (Wolk dan Tearney, 1997) maupun dalam implementasi dari sudut pandang budaya dan bahasa yang melatarbelakanginya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Tricker sebelumnya bahwa akuntansi sebagai anak dari budaya di mana akuntansi itu berada. Jika dikaitkan dengan konteks keberadaan akuntansi saat ini (akuntansi modern) sangat jelas bahwa akuntansi berkembang pesat dalam dimensi kapitalisme baru.

Belkaoui (1985) mendasarkan pada pendapat Karl Marx menyatakan bahwa akuntansi merupakan bagian dari ideologi kapitalis, yaitu alat untuk melegitimasi keadaan, struktur sosial ekonomi dan politik kapitalis. Akuntansi dinilai telah menjadi subsistem dari ideologi kapitalisme yang mengutamakan kepentingan pihak pemilik modal (Harahap, 1997). Akuntansi juga merupakan bentuk kesadaran yang palsu yang merupakan alat untuk memistikkan bukan memberikan informasi yang benar tentang hubungan sosial yang membentuk lembaga produksi (Harahap, 2001).

Pada tahun 1919, Sombart telah mengungkapkan adanya korelasi yang kuat antara akuntansi dan kapitalisme (lihat Kam, 1990; Chiapello, 2003) dengan menyatakan bahwa akuntansi dengan teknik *double-entry*nya berasal dari cikal bakal yang sama dengan kapitalisme. Sombart meyakini bahwa sistem akuntansi *double-entry* merupakan salah satu alat teknologi (*technological device*) yang mendukung perkembangan kapitalisme karena akuntansi mempengaruhi dua ciri penting dari kapitalisme dengan penggunaan bahasaperolehan laba dan rasionalitas ekonomi.

Dalam menguraikan peran akuntansi dalam perolehan laba dalam kapitalisme, Sombart (Kam, 1990 hal 24) menjelaskan adalah melalui perusahaan kapitalis (korporasi) yang digunakan

dalam mencari laba dalam dua aspek akuntansi, yaitu a) pemisahan antara pemilik dan pengelola, sehingga memungkinkan perusahaan tumbuh menjadi korporasi besar guna menopang sistem kapitalisme dan b) penggunaan aliran modal secara penuh melalui entitas bisnis dengan cara menerapkan akun modal menuju ke akun nominal untuk berbagai transaksi kemudian ke laporan keuangan dalam bentuk laba dan pada akhirnya kembali ke akun modal. Selain dari pada itu, akuntansi juga berperan dalam memformulasikan konsep modal secara kuantitatif, yaitu modal didefinisikan sebagai jumlah dalam akun modal. Adanya konsep modal secara kuantitatif ini mengungkapkan semakin jelasnya arti dari bahasa maksimalisasi laba.

Lalu bagaimana dengan peran akuntansi dalam mempengaruhi aspek rasionalitas ekonomi dalam konsep kapitalisme. Lebih lanjut Sombart menjelaskan bahwa peran akuntansi adalah menyederhanakan proses kalkulasi untuk produksi dan konsumsi (penggunaan barang dan jasa) karena hanya transaksi yang mempengaruhi perusahaan yang dicatat dan disajikan dalam satuan moneter. Dengan demikian dengan akuntansi memungkinkan melakukan analisis kegiatan operasi perusahaan dan penyusunan rencana bagi perbaikan perusahaan kedepannya atau dengan kata lain akuntansi memungkinkan dilakukannya aspek perencanaan dan pengendalian. Dalam aspek yang lain, akuntansi juga berperan dalam penyusunan kerangka konseptual untuk menjelaskan sifat sistem ekonomi kapitalis melalui penggunaan istilah-istilah bahasa seperti aset, kewajiban, modal, pendapatan, beban dan laba. Sehingga bahasa akuntansi dijadikan sebagai alat bagi kaum kapitalis dalam merasionaliskan keputusan-keputusan ekonomi yang memberikan kemanfaatan maksimal bagi dirinya. Lebih dari itu, akuntansi juga berkontribusi bagi efektifitas pelaksanaan perekonomian kapitalis melalui penyediaan informasi yang relevan untuk alokasi sumber daya secara efisien.

## Metode Penelitian

### Kajian Akuntansi Dalam Budaya Kapitalisme Baru

Diskursus mengenai kapitalisme *baru* (*new capitalism*) berkembang sebagai respon atas krisis pasca perang dunia kedua sebagai upaya kapitalisme

mentransformasi dirinya sehingga ekspansi ekonomi dapat terus berjalan. Transformasi ini meliputi restrukturisasi hubungan domain ekonomi, politik dan sosial dan “*re-scaling*” hubungan antara skala perbedaan kehidupan sosial global, regional, nasional dan lokal yang mendorong kearah terwujudnya kapitalisme global yang tak terbatas. Hal ini dipaksakan pada ekonomi “*post-socialist*” sebagai anggapan cara terbaik untuk transformasi sistem, pembaharuan ekonomi dan pengintegrasian kembali menuju ekonomi global (Fairclough, 2003).

Namun kapitalisme global dengan “anak emasnya” ekonomi global telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap kesejahteraan sosial secara universal. Negara-negara tidak lagi memperhatikan bahkan mengurangi proteksi terhadap masyarakatnya dalam menghadapi pasar bebas/pasar global. Terjadi peningkatan kesenjangan antara miskin dan kaya, meningkatkan perasaan tidak aman dan stres secara ekonomi serta semakin intensifnya eksploitasi atas buruh. Pertumbuhan yang tidak terbatas juga menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan. Kapitalisme global juga melahirkan imperiliasme baru, dimana lembaga-lembaga keuangan internasional dibawah pengawasan USA dan sekutu-sekutunya yang kaya (contoh IMF, World Bank) memaksakan restrukturisasi ekonomi secara diskriminatif, dan sering kali membawa konsekuensi yang mendatangkan malapetaka. Bentuk lain dari imperialisme baru adalah penggunaan aksi militer dalam “perang terhadap teroris” dalam bentuk fakta-fakta yang dipaksakan sebagai bagian dari upaya integrasi ekonomi internasional. Akibat dari semua ini adalah adanya disorientasi dan menghilangkan kekuatan secara ekonomi, politik dan sosial dengan melakukan alternatif radikal dan memberikan kontribusi pada berakhirnya debat publik serta melemahkan demokrasi (Fairclough, 2003).

Dalam menancapkan kukunya pada dunia, kapitalisme mendasarkan diri pada konsep liberalisme dan telah menjadi fondasi kuat bagi kapitalisme dalam mencengkram dunia. Secara ringkas ada tiga ciri utama dari konsep liberal ini, yaitu kebebasan individual untuk bersaing secara bebas, diakuiinya kepemilikan pribadi dan penentuan harga berdasarkan pasar bebas. Dan untuk melanggengkan dominasi

politiknya, maka dimunculkanlah gagasan neo-liberalisme berupa intervensi negara dalam pembentukan harga berdasarkan pasar bebasmelalui peraturan perundang-undangan (Rizky dan Majidi, 2008 hal. 233) sebagai akibat dari tekanan politik multilateral melalui kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan World Bank. Dalam pendekatan kebijakan luar negeri, penggunaan cara-cara politis, tekanan ekonomi, diplomasi dan bahkan intervensi militer pun dilakukan demi pembukaan pasar luar negeri dalam kerangka perdagangan bebas. Sertauntuk meningkatkan efisiensi korporasi, neoliberalisme berusaha keras untuk menolak atau mengurangi kebijakan hak-hak buruh seperti upah buruh, dan hak-hak daya tawar kolektif lainnya. Secara makro, tampak jelas bahwa dampak yang dihasilkan dari gelombang kapitalisme baru telah “meluluh lantakkan” sendi-sendi kehidupan yang tidak terbatas pada ruang dan waktu dengan bahasa globalisasinya. Disisi lain tentunya dampak secara makro sudah pasti akan berimbas pada skala yang lebih sempit (mikro), termasuk akuntansi didalamnya. Hal ini dapat ditinjau dari perumusan struktur teori akuntansi yang didefinisikan sebagai asumsi dasar, definisi- definisi, prinsip-prinsip dan konsep-konsep (Wolk dan Tearney, 1997) maupun dalam implementasi dari sudut pandang budaya dan bahasa yang melatarbelakanginya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Tricker sebelumnya bahwa akuntansi sebagai anak daribudaya di mana akuntansi itu berada. Jika dikaitkan dengan konteks keberadaan akuntansi saat ini (akuntansi modern) sangat jelas bahwa akuntansi berkembang pesat dalam dimensi kapitalisme baru.

Belkaoui (1985) mendasarkan pada pendapat Karl Marx menyatakan bahwa akuntansi merupakan bagian dari ideologi kapitalis, yaitu alat untuk melegitimasi keadaan, struktur sosial ekonomi dan politik kapitalis. Akuntansi dinilai telah menjadi subsistem dari ideologi kapitalisme yang mengutamakan kepentingan pihak pemilik modal (Harahap, 1997). Akuntansi juga merupakan bentuk kesadaran yang palsu yang merupakan alat untuk memistikkan bukan memberikan informasi yang benar tentang hubungan sosial yang membentuk lembaga produksi (Harahap, 2001).

Pada tahun 1919, Sombart telah mengungkapkan adanya korelasi yang kuat antara

akuntansi dan kapitalisme (lihat Kam, 1990; Chiapello, 2003) dengan menyatakan bahwa akuntansi dengan teknik double-entrynya berasal dari cikal bakal yang sama dengan kapitalisme. Sombart meyakini bahwa sistem akuntansi *double-entry* merupakan salah satu alat teknologi (*technological device*) yang mendukung perkembangan kapitalisme karena akuntansi mempengaruhi dua ciri penting dari kapitalisme dengan penggunaan bahasaperolehan laba dan rasionalitas ekonomi.

Dalam menguraikan peran akuntansi dalam perolehan laba dalam kapitalisme, Sobart (Kam, 1990 hal 24) menjelaskan adalah melalui perusahaan kapitalis (korporasi) yang digunakan dalam mencari laba dalam dua aspek akuntansi, yaitu a) pemisahan antara pemilik dan pengelola, sehingga memungkinkan perusahaan tumbuh menjadi korporasi besar guna menopang sistem kapitalisme dan b) penggunaan aliran modal secara penuh melalui entitas bisnis dengan cara menerapkan akun modal menuju ke akun nominal untuk berbagai transaksi kemudian ke laporan keuangan dalam bentuk laba dan pada akhirnya kembali ke akun modal. Selain dari pada itu, akuntansi juga berperan dalam memformulasikan konsep modal secara kuantitatif, yaitu modal didefinisikan sebagai jumlah dalam akun modal. Adanya konsep modal secara kuantitatif ini mengungkapkan semakin jelasnya arti dari bahasa maksimalisasi laba.

Lalu bagaimana dengan peran akuntansi dalam mempengaruhi aspek rasionalitas ekonomi dalam konsep kapitalisme. Lebih lanjut Sobart menjelaskan bahwa peran akuntansi adalah menyederhanakan proses kalkulasi untuk produksi dan konsumsi (penggunaan barang dan jasa) karena hanya transaksi yang mempengaruhi perusahaan yang dicatat dan disajikan dalam satuan moneter. Dengan demikian dengan akuntansi memungkinkan melakukan analisis kegiatan operasi perusahaan dan penyusunan rencana bagi perbaikan perusahaan kedepannya atau dengan kata lain akuntansi memungkinkan dilakukannya aspek perencanaan dan pengendalian. Dalam aspek yang lain, akuntansi juga berperan dalam penyusunan rerangka konseptual untuk menjelaskan sifat sistem ekonomi kapitalis melalui penggunaan istilah-istilah bahasa seperti aset, kewajiban, modal, pendapatan, beban dan laba. Sehingga bahasa akuntansi dijadikan sebagai alat

bagi kaum kapitalis dalam merasionalitaskan keputusan-keputusan ekonomi yang memberikan kemanfaatan maksimal bagi dirinya. Lebih dari itu, akuntansi juga berkontribusi bagi efektifitas pelaksanaan perekonomian kapitalis melalui penyediaan informasi yang relevan untuk alokasi sumber daya secara efisien.

## Hasil dan Pembahasan

Konsep-konsep dalam akuntansi banyak dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi yang berasal dari operasional praktis yang diperlukan. Namun ada juga yang berasal dari kerja-kerja teoritikal pada awal-awal perkembangan akuntansi (1930-1946) oleh kelompok-kelompok pengambilan keputusan akuntansi. Diantaranya yang terkenal adalah monograph dari Patton dan Littleton yang berjudul *An Introduction to Corporate Accounting Standards* ditahun 1940 yang menggunakan pendekatan teori secara deduktif dari pada "*point of view*" apa yang telah dilakukan dalam prakteknya. Monograph ini memberikan kerangka dasar (*basic framework*) yang dapat digunakan bagi perusahaan untuk menilai praktek-praktek akuntansinya guna lebih meningkatkan konsistensi dalam praktek akuntansi yang dihasilkan dari upaya-upaya mereka (Wolk dan Tearney, 1997 hal. 123).

Konsep dasar yang dimaksud oleh Wolk dan Tearney dalam bukunya disebut dengan postulat, aksioma, asumsi, doktrin, konvensi, batasan, prinsip dan standar. Mengutip dari Caws (1965), Wolk dan Tearney mendefinisikan konsep sebagai hasil dari proses mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menginterpretasikan sejumlah fenomena atau aturan. Konsep ini bukan merupakan bagian dari proses formal formulasi teori, namun dapat digunakan didalam teori sebagai bagian dari struktur postulat atau kejadian sebagai subyek pengujian dalam penelitian empiris. Yang dimaksud dengan postulat yaitu asumsi-asumsi dasar mengenai lingkungan bisnis perusahaan, sedangkan prinsip adalah pendekatan-pendekatan umum yang berguna dalam pengakuan (*recognition*) dan pengukuran (*measurement*) atas kejadian-kejadian akuntansi. Secara garis besar dapat dipaparkan rincian konsep dasar yang diistilahkan oleh Wolk dan Tearney (1997 hal. 125) sebagai *basic concepts underlying historical costing* sebagai berikut:

1) Postulates, terdiri dari *going concern, time periode, accounting entity, monetary Unit*, 2) Principles yang dibagi menjadi dua, yaitu *input-oriented principles*, yang terdiri dari *recognition, matching, conservatism, disclosure, materiality* dan *objectivity* serta *output oriented principles* yang terdiri dari *comparability, consistency* dan *uniformity*.

Di dalam teori akuntansi juga dikenal dengan asumsi-asumsi yang dikembangkan, terutama *Equity Theories* untuk menghubungkan perusahaan dengan pemilik dalam akun modal pemilik. Beberapa teori-teori deduktif mencoba untuk menggambarkan hubungan dan kegunaannya dalam menginterpretasikan hak-hak dan keinginan dari pemilik, sebagai turunan dari *equity theories*, yaitu: *proprietary theory, entity theory, residual equity theory, fund theory* dan *commnader theory*.

Berdasarkan pada pemaparan mengenai teori akuntansi dengan berbagai komponen di dalamnya menyiratkan penggunaan bahasa- bahasa akuntansi sebagai „*discourse driven*” bagi sebagian kalangan khususnya kelompok pengambilan keputusan akuntansi yang akan diterapkan guna “mengamankan” harta para pemilik modal dan memproduksi secara maksimal keuntungan yang dihasilkan dari perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan dari upaya perumusan konsep dasar akuntansi yang tidak bisa dilepaskan dari berbagai kepentingan didalamnya (*no value free*) sebagaimana dikatakan oleh Cooper dan Sherer (1984) yang dikutip oleh Wolk dan Tearney (1997 hal. 106) yang dikenal dengan bahasa *political economy of accounting* sebagai berikut:

*“Our position, that the objectives of and for accounting are fundamentally contested, arises out of recognition that any accounting contains a representation of a specific and political context. Not only is accounting policy essentially political in that it derives from the political struggles in society as a whole but also the outcomes of accounting policy are essentially political in that they operate for the benefit of some groups in society and to the detriment of others...Social welfare is likely to be improved if accounting practices are recognised as being consistently partial; that the strategic outcomes of accounting practices consistently (if not invariably) favor specific*

*interests in society and disadvantage others”.*

Jika kita membaca secara jelas bahasa yang digunakan oleh Cooper dan Sherer bahwa kebijakan akuntansi merupakan upaya *political struggles* dari sebagian kelompok kepentingan atas yang lainnya sehingga menghasilkan kebijakan akuntansi yang secara esensi dapat menghasilkan keuntungan baginya dan menyebabkan kerugian bagi yang lain. Karena kebijakan akuntansi yang kemudian dirumuskan dalam berbagai konsep dasar dan teori-teori yang dikembangkan tidak hanya secara sederhana dipandang sebagai bentuk efisiensi dan optimalisasi ekonomi, tapi juga mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan bagi sebagian kalangan. Sehingga isu-isu sosial dan politik lebih mengemuka ketimbang akuntansi itu sendiri.

Untuk memperjelas kajian wacana (*discourse*) kritisini, penulis menggunakan perspektif Triyuwono (2006) dalam melihat penggunaan bahasa dalam akuntansi khususnya dalam konsep dasar dan asumsi- asumsi teori yang digunakan yang dikaitkan dengan posisi akuntansi dalam budaya kapitalisme. Menurut Triyuwono (2006) secara implisit kedudukan kapitalis yang sentral telah mengakibatkan: (1) bentuk akuntansi menjadi egois, (2) bias materi, (3) tidak memperhatikan eksternalitas, (4) bias maskulin dan (5) berorientasi pada informasi berbasis angka.

Jika diperhatikan dari bahasa yang digunakan dalam konsep dasar atau asumsi- asumsi pada teori akuntansi, maka akan didapatkan beberapa penggunaan bahasa yang identik dengan nilai egoisme, antara lain konsep *going concern*, sebagaimana pernyataan Wolk and Tearney (1997 hal.125) yang menyatakan “...*unless there is to the contrary, it is assumed that the firm will continue indefinitely. As a result, under ordinary circumstances, reporting liquidation values for assets and equities is in violation of the postulate”.*

Hal ini menunjukkan nilai egoisme dari para pemilik modal untuk tetap mempertahankan kepentingannya melalui perusahaan serta diperkuat dengan bahasa konsep *accounting entity*. Meskipun dalam konsep tersebut dinyatakan bahwa ada pemisahan antara pemilik modal dan perusahaan, namun kepentingan para pemilik modal tetap “aman” dalam akun ekuitas. Nilai egoisme juga

muncul dalam bahasa *equity theories* dengan turunannya, yang berusaha menempatkan kepentingan pemilik modal dalam akun equitas sebagaimana menentukan komponen-komponen pendapatan didalamnya.

Ide utama teori ini adalah memahami perusahaan sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Terdapat dua pandangan yang berbeda dalam konteks *Entity Theory*. Pandangan pertama adalah pandangan tradisional yang memandang bahwa perusahaan beroperasi untuk keuntungan pemegang saham, yaitu orang-orang yang menanamkan dananya dalam perusahaan. Dengan demikian akuntansi akan diperlakukan sebagai laporan kepada pemegang saham tentang status dan konsekuensi dari investasi mereka. Pandangan kedua adalah anggapan bahwa sebuah entitas adalah bisnis untuk dirinya sendiri yang berkepentingan. Hal ini menyebabkan laporan akuntansi diberikan kepada pemegang saham hanya dalam rangka memenuhi persyaratan legal dan untuk mengelola hubungan baik dengan mereka dalam konteks bahwa sejumlah dana tambahan mungkin dibutuhkan dimasadeapan. Dalam prakteknya teori ini mengakibatkan manajemen mengemban tugas untuk memperoleh dan mengakumulasi kekayaan yang tanpa batas, entitas bisnis memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan pendapatan dan kekayaannya sendiri, dengan orientasi untuk kesejahteraan pemilik perusahaan. Entitas bisnis akan berperan sebagai agen pemilik perusahaan dengan orientasi kerja perolehan kekayaan secara tak terbatas baik untuk kesejahteraan pemilik juga untuk survivalitas dan perkembangannya sendiri. Bahkan yang lebih mengerikan lagi adalah entitas bisnis ini akan dijadikan sebagai mesin perang mengeruk kekayaan dan pertimbangan etis dikesampingkan.

Adanya bias materi dapat diperhatikan pada bahasa konsep *monetary unit* serta prinsip *conservatism* dan *materiality*. Dalam konsep *monetary unit*, proses pengukuran menggunakan ukuran uang sebagai standar prinsip dan nilai, tanpa memperhatikan faktor lain seperti kesejahteraan buruh, lingkungan dan sebagainya. Dan konsep ini berlindung dibalik prinsip *conservatism* dengan memilih metode akuntansi yang diterima secara umum yang sesuai demimenjaga kepentingannya atas sumber daya yang dimiliki, sehingga hal ini akan menimbulkan bias dalam penentuan tingkat

materialitasnya. Namun kemudian dengan prinsip *materiality* sebagai sesuatu hal yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi pengambilan keputusan atau evaluasi perusahaan. Sehingga perusahaan dapat berlindung dengan mengatasnamakan konsep dasar dan prinsip yang ada selama mereka masih dapat memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya.

Wolk and Tearney (1997, hal. 125) telah menjelaskan bahwa dalam prinsip-prinsip akuntansi terbagi menjadi dua bagian yaitu *input-oriented principles* dan *output-oriented principles*. Orientasi penilaian suatu perusahaan adalah pada laporan keuangan yang tidak hanya dapat digunakan oleh pihak internal maupun juga eksternal. Namun pada prakteknya, orientasi internalitas akuntansi lebih dominan dibandingkan dengan orientasi eksternal. Kecenderungan para pemilik modal untuk memaksimalkan keuntungannya mengakibatkan pengabaian tanggung jawab kepada pihak eksternal seperti faktor tenaga kerja, lingkungan alam, serta lingkungan sosial yang terkena dampak oleh aktivitas perusahaan.

Orientasi angka-angka akuntansi modern, sejalan dengan yang diutarakan oleh Hines(1989) bahwa tanpa angka-angka akuntansi, keadaan perusahaan tidak dapat tergambarkan. Dengan berlindung pada bahasa prinsip *comparability*, *consistency* dan *uniformity* memberikan jaminan bahwa orientasi pada angka-angka akuntansi ini menjadikan realitas bisnis oleh akuntansi berpusat pada angka yang akan dibentuk. Dampaknya informasi yang dimunculkan menjadi sangat parsial karena tereduksi oleh bentuk angka - angka yang diinginkan. Maka praktek akuntansi yang berlangsungakan berfokus pada "angka-angka" akuntansi yang akandiciptakan, agar kinerjanya baik maka akuntabilitas dari "angka" akuntansi yang dibentuk dikesampingkan, praktek-praktek manajemen laba, *transfer pricing*, *taking a bath* dalam akuntansi menjadi "hal yang wajar", dan skandal akuntansi pun semakin menjamur.

## Simpulan

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa awal-awal akuntansi mulai berkembang pada tahun 1930 – 1946 disaat terjadinya perang dunia kedua dan pasca perang dunia kedua. Jika dikaitkan dengan terjadinya transformasi kapitalisme ke



dalam kapitalisme baru dapat dikatakan bahwa akuntansi berkembang dimasa-masa perubahan tersebut. Sehingga pertumbuhan akuntansi bersamaan dengan proses transformasi kapitalisme baru tersebut dengan budaya yang melingkupinya. Oleh karenanya tidak mengherankan jika bahasa-bahasa yang digunakan di dalam perumusan kebijakan akuntansi sangat sarat dengan nilai-nilai kapitalisme yang berkembang pada saat itu.

Penggunaan bahasa telah menjadi „discourse driven” bagi sebagian kalangan untuk mengamankan kepentingan dan mendapatkan keuntungan secara maksimal. Konsep dasar dan teori-teori yang dikembangkan di akuntansi telah menjadi alat teknologi (*technological device*) yang digunakan sebagai justifikasi dari berbagai kepentingan yang menguntungkan kaum neokapitalis. Meskipun tidak dapat kita pungkiri bahwa banyak pula kemanfaatan yang dapat diperoleh dari akuntansi bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan dunia. Namun jika kita dapat lebih memahami bagaimana budaya yang berkembang disaat pertumbuhan akuntansi serta dinamika yang terjadi saat konsep dasar dan teori-teori akuntansi dimunculkan, kita akan lebih “*aware and wise*” dalam mensikapi persoalan ini. Bahkan dapat memberikan kontribusi kearah akuntansi yang lebih baik.

### Daftar Pustaka

- [1] Burrell, Gibson dan Gareth Morgan. 1979. Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life. London: Heinemann.
- [2] Chiapello, Eve. 2003. Accounting and the Birth of the Notion of Capitalism. Tersedia di <http://www.mngt.waikato.ac.nz/ejrot/cmsconference/2003/proceedings/criticalaccounting/Chiapello.pdf>. Diakses tanggal 16 Januari 2014.
- [3] Chua, Wai Fong. 1986. Radical Developments in Accounting Thought. The Accounting Review LXI (4), pp.601-32.
- [4] Eriksson, Paivi and Anne Kovalainen (2008). Qualitative Methods in Business Research. Sage Publication, City Road London.
- [5] Fairclough, Norman 2003. Critical Discourse Analysis in Researching Language in the New Capitalism: Overdetermination, Transdisciplinarity and Textual Analysis. Young (Ed). Systemic Linguistic and Critical Discourse Analysis.
- [6] Francis, Jere., 1990. After Virtue? Accounting as a Moral and Discursive Practice. Accounting, Auditing and Accountability Journal 3 (3) ; 5-17
- [7] Gioia, Dennis A. and Evelyn Pitre, 1990. Multiparadigm Perspective on Theory Building. The Academy of Management Review, 15, 4; ABI/INFORM Global pg. 584.
- [8] Harahap, Sofyan S. 1997. Akuntansi Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- [9] Harahap, Sofyan S. 2001. Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam. Jakarta: Pustaka Quantum.
- [10] Harahap, Sofyan S. 2007. Krisis Akuntansi Kapitalis dan Peluang Akuntansi Syariah. Jakarta. Penerbit Pustaka Kuantum.
- [11] Hines, Ruth D. 1989. The Sociopolitical Paradigm in Financial Accounting Research, Accounting, Organizations and Society 2(2); 72-92
- [12] Kam, Vernon. 1990. Accounting Theory (2nd edition). Canada: John Wiley & Sons.
- [13] Mathews, MR and MHB Perera., 1993, Accounting Theory and Development. Melbourne, Thomas Nelson Australia
- [14] Rizky, Awalil & Majidi. 2008. Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia. Jakarta: E-Publishing.
- [15] Salam, Muslim, 2011. Dialog Paradigma Metodologi Penelitian Sosial. Penerbit Masagene Press. Makasar.
- [16] Suwarjono, Tjiptohadi, 2005. Bahasa Akuntansi Dalam Praktek: Sebuah Critical Study. Tema, volume 6, nomer 2, hal. 89-110.
- [17] Tricker, Robert Ian, 1978. The Independent Director. Tolley ISBN 0 510-49378-5.
- [18] Triuwono, Iwan., 2006, Akuntansi Syariah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [19] Triuwono, Iwan. 2007. Mengangkat “Sing Liyan” untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. (Volume 1, Nomor 1, April 2010, 161-162).
- [20] Triuwono, Iwan. 2009. Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah. Jakarta: Rajawali Press.
- [21] Wolk, Harry I and Michael G. Tearney, 1997. Accounting Theory A Conceptual and Institutional Approach. Fourth edition, South-Western Collage Publish.